

Atas Nama Rakyat

Moh. Wan Anwar

Di antara komoditas politik yang paling murah diperjualbelikan—tapi amat menguntungkan para pelaku pasar kekuasaan—adalah rakyat. Dengan memperjualbelikan rakyat, seseorang bisa dengan gampang meraih dan mempertahankan kekuasaan. Rakyat menjadi komoditas paling populer bagi mereka yang terus-menerus berkekulasi untuk suatu kekuasaan. Sebentar-sebentar mereka bicara atas nama rakyat, setiap saat bertindak dan mengaku demi rakyat. Tidak jarang untuk suatu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh rasionalitas pikiran, mereka malah mempolitisasi rakyat. Dengan dalih demokrasi, mereka gampang sekali menggolong (mengatasnamakan) rakyat untuk kepentingan mereka sendiri.

Rakyat, betapa berharga dan dahsyat makhluk itu. Seorang diktator bisa tumbang karena rakyat. Platform seluruh partai politik merasa tidak sempurna bila tak menebarkan kata “rakyat” di setiap alineanya. Terakan demonstran, provokasi juru kampanye, pidato ketua partai, wakil rakyat, dan pemerintah dirasa tak betul bila tak menyertakan kata “rakyat”. Di samping janji palsu, rakyat adalah agunan pokok dalam teriakan dan pidato mereka yang targetnya meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Bahwa rakyat adalah modal dan agunan pokok bagi aktivitas politik tentu tak dapat kita ingkari. Hal ini sudah disadari pendahulu kita sejak dulu, sejak lahirnya gagasan negara dan pemerintahan yang berdasar pada rakyat. Bagaimana mungkin Soekarno-Hatta dapat memproklamasikan kemerdekaan negara-bangsa Indonesia tanpa mengatasnamakan rakyat (ingat: atas nama bangsa Indonesia). Namun, Soekarno-Hatta mengatasnamakan rakyat memang benar-benar berdasar pada representasi keinginan seluruh rakyat Indonesia karena rakyat tahu

dan merasakan betul apa artinya hidup di sebuah negara yang tidak merdeka.

Lain dulu lain sekarang. Kini ketika seseorang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya demi dan atas nama rakyat, kita ragu dan gariang menyimak pernyataan itu. Sulit mengidentifikasi siapa dan yang mana yang dimaksud rakyat dalam kata-kata orang itu. Kini kita saksikan juga sejumlah kelompok kepentingan bertikai ketika justru sama-sama mengaku berpijak dan atas nama rakyat. Lalu kalau berpijak dan atas nama rakyat yang sama, mengapa mereka bertikai?

Dulu memang tidak sulit mengidentifikasi siapa dan yang mana rakyat itu. Pada saat itu rakyat adalah sebuah komunitas yang sama-sama merasakan perih dan pedihnya hidup dijajah Belanda. Rakyat adalah sebuah komunitas yang diperas bagai sapi perah oleh penjajah melalui tangan sejumlah priyayi kita yang menjadi kolaborator kaum penjajah.

Namun kini, bila sekian orang berdiskusi merumuskan siapa dan yang mana rakyat boleh jadi tak meneriukan rumusan yang dapat diterima semua pihak. Rakyat kini telah menjadi konsep yang dipersepsi oleh berbagai kelompok menurut kacamata dan kepentingan yang berbeda. Rakyat kini menjadi abstrak pengertiannya. Rakyat menjadi penuh dengan warna: kuning, hijau, merah, biru, dan sejumlah varian warna lainnya. Yang disebut rakyat sekarang adalah sekelompok manusia yang diturunkan ke jalan, dilatih, dicat dengan warna tertentu, namun pada saat yang sama bertikai dengan sekelompok manusia yang juga diturunkan ke jalan oleh pemimpin yang berwarna lain. Rakyat bertikai dengan rakyat, lalu yang mana sosok rakyat yang sebenarnya?

Rakyat kini ibarat “makhluk gaib” di sebuah ruangan gelap: si A mengaku

telah mendengar jeritannya, si B mengaku merasakan penderitaannya, si C mengaku menaeknap aspirasinya, si D mengaku bersandingan dengannya, bahkan ada yang mengaku telah berjabat erat dengan tangan dan hatinya; namun ketika lampu dinyalakan, semua orang di ruang gelap itu sedang erat-erat mendekap kursinya masing-masing. Semua orang tahu tak ada rakyat di situ. Bahkan di ruang terbuka yang terang-benderang sekalipun, ketika banyak orang mengaku dekat dengan rakyat, sebenarnya semua orang tahu rakyat sudah tak ada di ruang itu.

Ah rakyat, kalian ibarat gajah di pelupuk mata politisi, ketika justru mereka berkoar berjuang demi dan atas nama kalian. Banyak orang mengkalukulasi kalian tapi tak pernah menyentuh kalian dengan hati lalu menyapanya secara real. Kalian adalah kumpulan orang yang hidup miskin, dipinggirkan, karena itu tak lagi punya daya. Tak seperti dulu ketika kalian dan pemimpin kalian bahu-membahu mengusir para penjajah.

Setelah negeri ini merdeka, rakyat memang lebih banyak menjadi objek bagi-bagi kue para penguasa, apalagi di zaman Orde Baru. Rakyat sengaja dibuat tak berdaya. Akan tetapi, di tengah ketakberdayaannya, kita tahu, rakyat yang hidup miskin dan melarat itu demikian gagah dan kaya karena mampu menhidupi banyak orang. Ingat, partai politik, wakil rakyat, dan pemerintah justru bisa hidup dengan sejahtera karena keberadaan rakyat. Bukan hanya itu, wartawan bisa dapat duit justru karena melaporkan kondisi rakyat, koruptor selamat karena bersembunyi di balik rakyat, pejabat lenggang-kangkung karena mengenakan baju rakyat, bahkan seniman atau sastrawan jadi populer karena menuliskan tentang rakyat. Ironis, rakyat yang mampu menhidupi banyak orang justru terus-menerus hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, bergelimpang dalam lumpur penderitaan.

Tetapi siapakah dan yang mana sosok rakyat itu? Soalnya masing-masing pemimpin yang bertikai belakangan ini justru selalu mengaku

didukung, berjuang demi dan atas nama rakyat. Rakyat menjadi absurd, ia hadir tak lebih dari sebatas retorika. Terlalu mahal rasanya meminta penjelasan siapa dan yang mana rakyat secara konkret kepada para pemimpin yang justru sibuk gontok-gontokan.

Tetapi bukankah kita harus tahu siapa rakyat yang selalu diatasnamakan wakil rakyat dan penguasa itu? Baiklah, di tengah keruk-pikuk Indonesia ini, mari hening sejenak menyelami khasanah sastra kita yang menggambarkan rakyat secara kongkret. Temuilah kembali rakyat miskin di Dukuh Paruk trilogi Ahmad Tohari, di desa Wana-galih *Para Priyayi* Umar Kayam, Sajah dan Adinda dalam sajak Rendra, Si Toni dalam sajak Taufiq Ismail, penduduk miskin di Juranggede *Burung-burung Manyar* Mangunwijaya, perampok dalam *Umang-smang* Arifin C. Noer, kere-jelata dalam cerpen-cerpen Seno Gamira Ajidarma dan Joni Ariadinata, dan banyak lagi karya kita yang “berpihak” pada mereka.

Tanpa dihadirkan dalam temuan demonstran, pidato politisi, wakil rakyat, dan pemerintah, dalam khasanah sastra kita rakyat hadir begitu konkret dan gamblang. Mereka yang hidup miskin dan dipinggirkan itu, ternyata sering tidak peduli dengan slogan dan platform partai, siapa yang jadi anggota DPR, menteri, dan atau presiden. Mereka yang sedemana itu cuma berharap bisa makan, berpakaian, tidur nyenyak, lawin, aman dan damai. Sayangnya, keinginan semacam itu, di tengah target-target politik wakil dan pemimpin kita, adalah keinginan yang mewah dan boleh jadi mengada-ada.

Rakyat telah lama memang ditenggelamkan (baca: dikorbkan) di tengah kegaduhan politik wakil rakyat dan penguasa. Akan tetapi di tengah asyik-asyiknya memantapkan diri dan berpura-pura menjadi wakil dan pemimpin rakyat, mereka agaknya alpa bahwa sudah sangat lama rakyat tak lagi kelewat peduli pada mereka. Demi dan atas nama rakyat, semoga para pemimpin kita tak lagi gegabah membilang pernyataan dan perbuatan yang mengatasnamakan rakyat. ■